

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin hari semakin pesat karena adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang bisa diraih melalui adanya otonomi daerah (Azlim, 2012). Maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga akan menuntut daya saing di setiap pemerintah daerahnya. Di Indonesia harus dikembangkan suatu iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga pilar elemen dasar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kinerja pegawai perlu mendapatkan perhatian karena masih buruknya potret kinerja PNS di Indonesia. Saat ini 30% dari 4,7 juta pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kinerja yang buruk dan 95% dari total PNS tersebut tidak memiliki potensi di bidangnya. Pegawai negeri sipil bekerja buruk dapat dipecat, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, peraturan ini belum efektif dilakukan. Oleh karena itu penelitian kinerja OPD perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja di pemerintahan masih buruk (Mas'uda, 2018).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan. Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas di lembaga publik baik di pusat maupun di

daerah yang dapat menimbulkan implikasi bagi pemerintahan sektor publik untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi. Menurut Kasmir (2015) laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dasar pengelolaan laporan keuangan yang baik perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan (Fransiska dkk, 2016).

Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yakni (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang pertama yaitu sumber daya manusia. Menurut (Winindyaningrum, 2010), sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan

intelektual dan kepribadian serta keterampilan khusus seseorang atau kelompok dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Selain sumber daya manusia yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi seperti komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan maka akan lebih cepat, akurat dan otomatis dari pada menggunakan sistem manual. Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 pada sistem informasi keuangan dijelaskan bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan proses perkembangan yang sejalan dengan tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Sistem pengendalian intern juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Hartadi (2002), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui suatu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pengamanan aset, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah sesuai dengan penelitian Yudianta dkk (2012), Riandani (2017) dan Wati (2014) yang memberikan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel teknologi informasi penelitian yang dilakukan oleh Yudianta dkk (2012) dan Mutia (2017) menyatakan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) memberikan hasil penelitian bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.

Hasil penelitian terkait dengan variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudianta dkk (2012), Mutia (2017) dan Wijayanti (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mokoginta (2017) menyatakan hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian terkait dengan variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan OPD sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014) dan Pujanira (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Ihsanti (2014) menyatakan hasil bahwa sitem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam menyusun laporan keuangan yaitu kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah saat ini memiliki keahlian dan ditunjang dengan teknologi yang cukup memadai, namun masih tidak memberikan perubahan yang besar dalam peningkatan kinerja. Selain itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah sering kali tidak memiliki etos kerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila sumber daya manusia tidak memiliki salah satu kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan informasi.

Berdasarkan beberapa kajian dari penelitian terdahulu dan adanya perbedaan hasil-hasil penelitian, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudianta dkk (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yudianta dkk (2012) yang pertama yaitu, penggantian variabel komitmen organisasi menjadi sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada penelitian Pujanira (2017). Variabel sistem akuntansi pemerintah daerah diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Lalu perbedaan yang kedua yaitu, penelitian ini menggunakan sampel pada OPD di kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2019, sedangkan Yudianta melakukan penelitian pada OPD di kabupaten Gianyar pada tahun 2012.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.
2. Pengaruh sistem teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.
4. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada sektor publik tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern

dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah.